

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009).

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sector publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, Haryanto (2007) dalam Rohman (2009). Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Wilson dan Kattelus (2002) dalam Rohman (2009). Akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (periodic reports), laporan keuangan interim (interim financial reports), dan laporan keuangan tahunan

(annual financial reports). Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah laporan keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas harus merancang sistem akuntansinyasendiri yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas publik.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pe-rombakan yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan ekonomi publik. Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Akuntabilitas membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini men-genai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerin-tah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Stanbury, 2003). Kurangnya pe-merintah dalam melaksanakan akuntabilitas un-tuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawa-ban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan kare-na laporan tahunan yang tidak memuat semua in-formasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu seca-ra mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah telah terjadi reformasi yang mendasar yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegakan hukum. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

Dalam kaitannya untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangannya secara baik dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses melihat pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menciptakan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Pengelolaan keuangan daerah dimana penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, naraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengangkat judul ini bagaimana “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dari latar belakang di atas yaitu:

Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris bahwa Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih memahami Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan Untuk menambah wawasan mengenai Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo., serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pihak Kantor BPKAD mengambil kebijakan yang lebih baik dengan meningkatkan penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab, berkeadilan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan karena informasi yang disajikan, dalam laporan keuangan pemerintah masih menemukan penyimpangan informasi laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan pemerintah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Peneliti membuat ruang lingkup penelitian agar membatasi cakupan penelitian supaya tidak melenceng dari pokok permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan pada seluruh staf yang berada di sub bagian keuangan karena mereka lebih memahami tentang penyajian laporan keuangan, Penelitian ini dilakukan di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) yang ada dilingkungan kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan Teori menjabarkan teor-teori relevan yang mendukung penelitian. Teori teori tersebut inilah yang akan mendukung kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis dan menganalisis hasil penelitian.

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "nexus of contract" (Subaweh, 2008).

Teori keagenan (Agency Theory) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli, 2001).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejakdi berlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subaweh, 2008). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (self interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interst-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko (risk averse) (Herawati dan Baridwan, 2007 dalam Safitri 2009). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (stakeholders). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan

bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.2 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2015: 105) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:1) Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, dan arus kas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

(a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;

(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/deficit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan

kebijakan dan kesalahan mendasar. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.1 Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, Lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, PSAP 01 – 2 pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian akan dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan yang berarti laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang termuat dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan: (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), (b) Memiliki Manfaat Prediktif (predictive value), (c) Tepat Waktu, (d) Lengkap. (2) Andal yang berarti informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Setiap butir informasi yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi dapat dicegah. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: (a) Penyajian Jujur, (b) Dapat diverifikasi (verifiability), (c) Netralitas, (d) Dapat Dibandingkan, (e) Dapat Dipahami.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan.

Komponen pelaporan keuangan merupakan satu set laporan, terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan

memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pospos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Menurut Diamond (2002), informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu: (1) meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola; (2) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (3) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan

semua sumber daya dan kewajiban; (4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat luas. Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (goodgovernance) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti responsiveness,

consensus orientation, equity efficiency, effectiveness dan strategic vision. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP dan World Bank. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public antara lain, yaitu: 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap

berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa entrepreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah 22 berkenaan dengan pengelolaan

keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004). Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris

milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Steccolini. 2002. <i>Is The Annual Report An Accountability Medium? An Empirical Investigation Into Italian Local Governments</i>	Variabel independen adalah Penyajian Laporan Tahunan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel dependennya adalah akuntabilitas Laporan Tahunan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan aktual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda di Italia perlu dipertanyakan.
2	Budi Mulyana. 2006. <i>Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah</i>	Variabel independennya adalah Penyajian Neraca Daerah (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh

		Daerah.	positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
3	Saufi Iqbal Nasution. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.	Variabel independennya adalah Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah.	Secara parsial dan simultan, Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4	Frans. 2011 tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Diwilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasandutan, dan Kabupaten	Variabel independennya adalah Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

	Samosir.		
5	Siti Aliyah dan Aida Nahar. 2012 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	Variabel independennya adalah Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
6	Sukhemi. 2012. Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Variabel independennya adalah Akseibilitas (X1) dan Tingkat Pengungkapan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).	Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain.

7	Peggy Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Variabel independennya adalah Penyajian Laporan keuangan (X1) dan Akseibilitas (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
8	Yuni Sastra 2013. pengaruh penyajian dan akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan,	Variabel independennya Adalah pengaruh penyajian (X1) akseibilitas laporan keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).	hasil penelitiannya mengatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9	Salomi J. Hehanussa. 2015 Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan	Variabel independennya Adalah pengaruh penyajian laporan keuangan (X1) akseibilitas	penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Ambon	laporan keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).	transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
10	Hesti Kurniawati dan Magdalena.2016 Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Variabel independennya Adalah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah (X1) aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), Sistem akuntansi keuangan daerah(X3) sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).	Penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah dan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

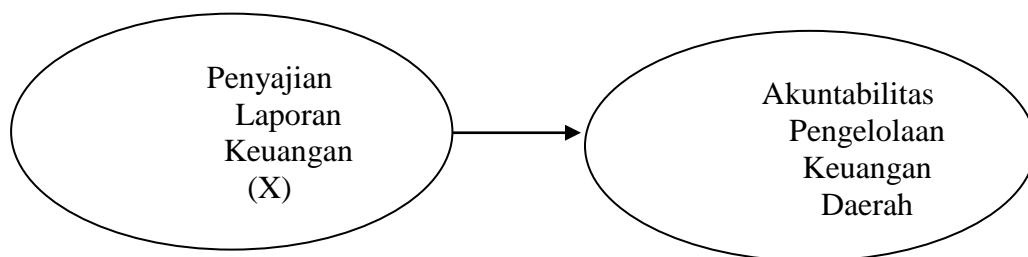
2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual /pemikiran menjelaskan tentang struktur hubungan yang dapat menunjukkan adanya kaitan variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang “Pengaruh Penyajian

Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo”. Maka penulis dapat menggambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.6 Hipotesis Penelitian

Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan

berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mulyana (2006) menyatakan penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H: Diduga penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan menggunakan analisis data statistik, yakni menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagiannya maupun pada hubungannya.

Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsuddin & Damayanti: 2011). Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Pada penelitian ini akan mengambil tempat lokasi pada Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah (BPAKD) Kota Palopo. Sedangkan waktu Penelitian ini akan dilaksanakan \pm sekitar 1 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi (*population*) data yang diteliti, yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi (*population element*), (Ruslan, 2006:133).

Peneliti yang meneliti seluruh elemen-elemen populasi, disebut ‘sensus’, dan jika meneliti sebagian dari elemen-elemen tertentu suatu populasi, disebut penelitian ‘sampel’ (Ruslan, 2006:139).

Populasi adalah sekaligus sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai yang berkerja di kantor Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kota Palopo.

Jumlah pegawai dan bidang yang menjalankan roda system adamnistrasi Kantor Badan Pengelolaan Keungan Aset Daerah Kota Palopo adalah berjumlah keseluruhan 111 orang yang tebagi dalam 4 bidang yaitu:

a. Bidang asset.

NO	STATUS	JUMLAH
1	ASN	7
2	HONORER	23

b. Bidang Umum/ Sekertariat

NO	STATUS	JUMLAH
1	ASN	13
2	HONORER	25

c. Bidang Akuntansi

NO	STATUS	JUMLAH
1	ASN	11
2	HONORER0	10

d. Bidang Anggaran

NO	STATUS	JUMLAH
1	ASN	16
2	HONORER	18

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *sampling sensus* yang dimana peneliti mengambil seluruh sampel yang berada dalam populasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden pada kantor Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kota Palopo.

Sumber data lain yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*). *Library Research* dilakukan dengan mempelajari teori-teori ataupun konsep yang telah ada pada buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah. *Library Research* juga dilakukan dengan mengakses *website* atau situs-situs yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan). *Field research* yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan survei pertanyaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung oleh peneliti serta melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian (*observasi*).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert atau sering disebut sebagai *method of summated ratings* dengan menggunakan rentang skor dari 1 sampai 5 terhadap tingkat setuju atau ketidaksetujuannya. Dalam menjawab kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan memilih dan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu dari lima pilihan jawaban yang telah disediakan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel independen adalah Penyajian Laporan Keuangan(X) Sedangkan variabel dependen adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu ragu, Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

3.6.2 Defenisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan defenisi variabel operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun kuisisioner penelitian, Menurut Jogiyanto (2004), operasional adalah hasil dari pengoperasionalan konsep kedalam elemen - elemen yang dapat di observasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam konsep.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan(X), dan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Adapun penjelasan operasionalnya yaitu:

3.6.2.1 Penyajian Laporan Keuangan (X)

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yangditerima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah Daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah.

3.6.2.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang sering digunakan pada penelitian ini adalah angket yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Selain angket, terdapat juga pedoman wawancara sebagai tindak lanjut dari pemberian angket agar hasil penelitian lebih akurat. Seperti penelitian pada umumnya, teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif dilakukan dengan observasi studi pendahuluan, pemberian angket, dan wawancara. Kemudian data diolah berdasarkan teknik analisis data yang sesuai.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Iqbal Hasan (2001) menjelaskan bahwa statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

3.8.2 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006) validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan menurut Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3.8.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner

tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Menurut Sugiono (2012) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

3.8.4 Analisis Linear Sederhana

Regresi dapat digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dirubah-rubah. Analisis regresi, selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0

β = Arah koefisien regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X. Bila (+) maka arah garis akan naik, dan bila (-) maka nilai garis akan turun

X = Penyajian Laporan Keuangan

ϵ = faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y

3.8.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali,

2011). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3.8.4.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel independen (X) benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005).

3.8.4.3 Uji Statistik F

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Penelitian

a. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden.

Tabel 4.1 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

	Keterangan	Jumlah
	Jumlah kuisisioner yang disebar	60
	Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	(26)
	Jumlah kuisisioner yang tidak dapat diolah	(0)
	Jumlah kuisisioner yang dapat diolah	34

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

b. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari, tingkat jenis kelamin, pendidikan, status pegawai.

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	20	58,8%
2	Wanita	14	41,2%
Jumlah		34	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

34 responden yang merupakan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo terdiri dari 20 Pegawai atau 58,8% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan wanita sebanyak 14 Pegawai atau 41,2%.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA/Sederajat	11	32%
2	D3	3	9%
3	S1	20	59%
4	S2	0	0
4	S3	0	0
Jumlah		34	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada yang menjadi responden pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo penelitian ini di dominasi tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 pegawai atau 59% dari jumlah responden. Tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 11 atau

32%. Tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 auditor atau 9 %. Sedangkan tingkat pendidikan S2 dan S3 sebanyak 0 auditor atau 0%.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Kedudukan di KAP

Tabel 4.4 Kedudukan di BPKAD Kota Palopo

No	Kedudukan	Jumlah	Presentase
1	Kepala Bidang	0	0
2	Staf	34	100%
Jumlah		34	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kepala bidang 0 atau 0 dari 34 Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo berkedudukan sebagai Kepala Bidang. Sedangkan 34 atau 100% Pegawai berkedudukan sebagai Staf.

4.1.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

A) Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif. Untuk mengkategorikan rata-rata jawaban responden digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jawaban kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Dengan interval kelas 0,8 kemudian disusun kriteria rata-rata jawaban responden yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Penilaian Jawab Responden

Interval	Kategori
$4,21 < a < 5,00$	Sangat setuju
$3,41 < a < 4,20$	Setuju
$2,61 < a < 3,40$	Kurang Setuju
$1,81 < a < 2,60$	Tidak Setuju
$1,01 < a < 1,80$	Sangat Tidak Setuju

Sumber : Data yang diolah, 2020

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian. Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		td. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Laporan Penyajian Keuangan Akuntabilitas	34	36	45	42,59	,514	2,996
Pengelolaan Keuangan Daerah	34	45	50	48,44	,296	1,727
Valid N (listwise)	34					

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.6 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain :

1) Penyajian Laporan Keuangan (X)

Berdasarkan tabel diatas X memiliki nilai minimum 36,00 nilai maksimum 45,00 dan mean 42.5882 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2.99614 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan tabel diatas Y memiliki nilai minimum 42,00 nilai maksimum 50,00 dan mean 47.3529 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2.66154 dari nilai rata-rata jawaban responden.

B) Hasil Uji Kualitas Data

1) Hasil Uji Validitas

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan *pearson correlation*. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji validitas pada 2 variabel yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (PLK) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD).

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji validitas pada 2 variabel yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (PLK) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD).

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

	Butir Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2- Tailed)	Keterangan
X	LPK1	0,792**	0,000	VALID
	LPK2	0,894**	0,000	VALID
	LPK3	0,872**	0,000	VALID
	LPK4	0,792**	0,000	VALID
	LPK5	0,684**	0,000	VALID
	LPK6	0,734**	0,000	VALID
	LPK7	0,471**	0,000	VALID
	LPK8	0,730**	0,000	VALID
	LPK9	0,752**	0,000	VALID
Y	RA1	0,626**	0,000	VALID
	RA2	0,483**	0,000	VALID
	RA3	0,731**	0,000	VALID
	RA4	0,417**	0,000	VALID
	RA5	0,528**	0,000	VALID
	RA6	0,432**	0,000	VALID
	RA7	0,212**	0,000	VALID
	RA8	0,483**	0,000	VALID
	RA9	0,401**	0,000	VALID
	RA10	0,347**	0,000	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1.2 (3) diketahui bahwa variabel Laporan Penyajian Keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

C) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ($>$) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Laporan Penyajian Keuangan (X)	0,902	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,620	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan

kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

D) Hasil Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Setelah hasil uji reliabilitas dilakukan maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi linear sederhana.

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	31.739	3.187		9.960	.000		
X	.392	.075	.681	5.254	.000	0.989	1.014

a. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 31.739 - 392 X + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta adalah 31.739 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (laporan penyajian keuangan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah) sebesar 31.739 satuan.

b) Koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan (b_2) adalah 0,392 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,392 jika nilai variabel X mengalami kenaikan. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X) dengan variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Semakin tinggi Penyajian Laporan Keuangan, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah semakin meningkat.

2) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.10 Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,681 ^a	,463	,446	1,285

a. Predictors: (Constant), Laporan Penyajian Keuangan

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari tabel 4.10 di atas terdapat angka R sebesar 0,681 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dengan variabel independennya kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 0,463 atau 46,3% ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Laporan Penyajian Keuangan Daerah sebesar 46,3%

sedangkan sisanya 53,7% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

3) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	45,562	1	45,562	27,602	,000 ^b
Residual	52,821	32	1,651		
Total	98,382	33			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Laporan Penyajian Keuangan

Sumber : Data yang diolah, 2019

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Penyajian Keuangan mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.

4) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12 Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	31,739	3,187		9,960	,000
Laporan Penyajian Keuangan	,392	,075	,681	5,254	,000

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti **H diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Nilai t yang bernilai +5,254 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dikatakan signifikan karena nilai sig. variabel penyajian laporan keuangan daerah adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya.

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen

penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian neraca SKPD berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan

daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

“Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Palopo harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna eksternal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Palopo diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, pemerintah daerah Kota Palopo diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa, seperti surat kabar, radio, website, dan media lainnya yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah Kota Palopo terhadap masyarakat.
2. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana dan pada akhirnya akan mampu meminimalisir praktek korupsi dan nepotisme oleh para aparatur sehingga clean government secara bertahap akan bisa terwujud.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh

kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengumpulkan data dapat dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, penggantian teknik pengambilan sampel penelitian serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. Selain itu juga dapat memperluas sampel dan lokasi penelitiannya agar hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Safitri, Ratna. 2009. Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Sukhemi. 2010. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 5, April: 85-100.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2004, *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*, Cetakan Majalah Media Akuntansi, Edisi No. 39, April, hal. 12
- Haryanto dkk, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Wilson & Kattelus, "Accounting For Governmental and Non Profit Entities" 2002 13th Edition, Irwin, North America.
- Stanbury, W.T., 2003, 'Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality', Fraser Institute Digital Publication, Canada.
- Abdul Rohman (2009), *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada PEMDA Di Jawa Tengah)*.
- Subaweh. Imam, (2008). *Agency Theory dalam pemerintahan daerah*.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2001. *Teori Akuntansi*, Diterjemahkan oleh Marwata dkk. Salemba Empat, Jakarta.
- Herawati, Nurul dan Zaki Baridwan. 2007. *Manajemen Laba Pada Company Yang Melanggar Perjanjian Hutang*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

- Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required? IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Katz, Ellen, 2004, Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy, Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA.
- Nordiawan Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. Jurnal akuntansi dan auditing.
- Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin. September 2002.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati dkk 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Bandung. Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
- PSAK No .1 (Revisi 2009) Mengenai Penyajian laporan keuangan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 – 2 Mengenai Laporan Keuangan
- Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan
- Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) Mengenai Laporan Keuangan.
- Standar Akuntansi Keuangan (2009:1) Mengenai Penyajian Laporan Keuangan
- LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Erlangga